

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022



Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
097577**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022
BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

Lebak - Banten 42314

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebak, 30 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.

NIP. 196607091989031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung	21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	22
A.3. Basis Akuntansi	22
A.4. Dasar Pengukuran	22
A.5. Kebijakan Akuntansi	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	31
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	35
C.1.2 Persediaan	35
C.1.3 Piutang Bukan Pajak	36
C.2.1 Tanah	36
C.2.2 Peralatan dan Mesin	37
C.2.3 Gedung dan Bangunan	38
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	38
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	39
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39

C.2.7 Aset Tetap yang Belum diregister	40
C.2.8 Aset Lain-lain	40
C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	40
C.3.2 Utang Yang Belum Ditagihkan	41
C.3.3 Hibah yang Belum disahkan	41
C.3.4 Uang Muka dari KPPN	41
C.4.1 Ekuitas	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	42
D.2. Beban Pegawai	42
D.3. Beban Persediaan	43
D.4. Beban Barang dan Jasa	43
D.5. Beban Pemeliharaan	44
D.6. Beban Perjalanan Dinas	44
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.8. Kegiatan Non Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
E.1. Ekuitas Awal	45
E.2. Surplus (defisit) LO	46
E.3. Koreksi Nilai Persediaan	46
E.4. Transaksi Antar Entitas	46
E.5. Ekuitas Akhir	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	46
F.2. Pengungkapan Lain-lain	46
Laporan-laporan Pendukung	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057 e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebak, 30 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.

NIP. 196607091989031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 11.847.000,- atau mencapai 96 % dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 12.404.000,-.

Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 3.040.527.981,- atau mencapai 43% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.097.084.000,-

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 11.847.000,- atau mencapai 96 % dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 12.404.000,-.

Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 3.040.527.981,- atau mencapai 43% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.097.084.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan Aset sebesar Rp. 25.928.226.919,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 45.350.000, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 4.349.682.767) sebesar Rp. 25.882.876.919,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya dengan rincian aset lain-lain Rp. 304.672.275,- (akumulasi penyusutan Rp. 304.672.275,-) dengan total nilai aset lainnya Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 833.303.282,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 833.303.282,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 25.094.923.637,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 12.812.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.714.906.293,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.702.094.293,-). Pendapatan Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0, Beban Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 279.000,- dan surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp. 279.000,-). sehingga mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp. 3.702.373.293,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022

adalah sebesar Rp. 25.768.337.449,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp. 3.702.373.293,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 278.500. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.028.680.981,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 25.094.923.637,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	Per 30 Juni 2022			Per 30 Juni 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	12.404.000	11.847.000	96,00	7.172.600
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		12.404.000	11.847.000	96,00	7.172.600
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	5.235.381.000	1.901.696.732	36,00	2.447.869.778
2. Belanja Barang	B.2.2.	1.620.703.000	1.029.614.249	64,00	804.498.164
3. Belanja Modal	B.2.3.	241.000.000	109.217.000	45,00	0
Jumlah Belanja Negara		7.097.084.000	3.040.527.981	43,00	3.252.367.942

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. *NERACA PERBANDINGAN*

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NERACA
PER 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	40.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	965.000	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1. 3.	965.000	0
Persediaan	C.1. 4.	4.385.000	2.842.250
Jumlah Aset Lancar		45.350.000	2.842.250
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.878.644.546	2.850.177.546
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9.388.641.000	9.142.616.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	24.656.000	24.656.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	16.957.140	16.957.140
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2. 7.	(4.349.682.767)	(4.084.021.910)
Aset Tetap Yang Belum Diregister	C.2. 8.	93.750.000	0
Jumlah Aset Tetap		25.882.876.919	25.780.295.776
Aset Lainnya			
C.3			
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.3. 2.	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(304.672.275)	(304.672.275)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		25.928.226.919	25.783.138.026
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.4			
Uang Muka dari KPPN	C.4. 1.	40.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.	530.928.282	14.800.577
Utang yang belum ditagihkan	3.	3.350.000	0
Hibah yang belum disahkan	4.	259.025.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		833.303.282	14.800.577
Jumlah Kewajiban		833.303.282	14.800.577
EKUITAS			
Ekuitas			
C.5			
Jumlah Ekuitas		26.032.453.910	26.290.183.360
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		26.072.453.910	26.310.087.094

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12.812.000	7.067.000
Jumlah Pendapatan		12.812.000	7.067.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.403.164.814	2.439.523.669
Beban Persediaan	D. 3	31.190.250	39.983.200
Beban Barang dan Jasa	D. 4	500.827.257	465.910.209
Beban Pemeliharaan	D. 5	487.063.115	266.006.330
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	27.000.000	20.300.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	265.660.857	278.373.984
Jumlah Beban		3.714.906.293	3.510.097.392
(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.702.094.293)	(3.503.030.392)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	105.600
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		279.000	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 8	(279.000)	105.600
Pos Luar Biasa	D. 9	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.702.373.293)	(3.502.924.792)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	25.768.337.449	26.290.183.360
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.702.373.293)	(3.502.924.792)
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	E. 3	278.500	
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	278.500	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Lain-Lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	3.028.680.981	3.245.195.342
Kenaikan/penurunan ekuitas		(673.413.812)	(257.729.450)
Ekuitas Akhir		25.094.923.637	26.032.453.910

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Rangkasbitung terletak di Jalan RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG YANG AGUNG" Visi sendiri memiliki pengertian suatu pernyataan mengenai tujuan dari organisasi yang disampaikan atau diekspresikan melalui pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang didapatkan juga aspirasi dan cita-cita dimasa yang akan datang.

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasaran Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsur yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.
11.847.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 11.847.000 atau mencapai 96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.404.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB (Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2022		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.404.000	11.847.000	96.00
Total Pendapatan		12.404.000	11.847.000	96.00

Realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,01% dibandingkan 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan karena adanya Pembayaran Sewa kantin pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode 3 (tiga) tahun dan adanya kenaikan tarif sewa rumah dinas sesuai edaran Bupati Kabupaten Lebak untuk Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun) %
		(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.847.000	7.172.600	39.45
Total Pendapatan		11.847.000	7.172.600	39.45

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja: Rp.
3.040.527.981

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 3.040.527.981,- atau sebesar 43,00% dari anggaran senilai Rp. 7.097.084.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2022

Uraian	30 Juni 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.235.381.000	1.901.696.732	36.00
Belanja Barang	1.620.703.000	1.029.614.249	64.00
Belanja Modal	241.000.000	109.217.000	45.00
Total Belanja Bruto	7.097.084.000	3.040.527.981	43.00
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	7.097.084.000	3.040.527.981	43.00

Kondisi realisasi belanja periode Semester I Tahun 2022 atau per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan dikarenakan pengurangan jumlah hakim dan pegawai selama Semester I Tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah hakim dan pegawai pada periode semester I Tahun 2021 beberapa pegawai dan hakim yang mendapatkan promosi jabatan.
2. Ada beberapa yang mengakibatkan kenaikan realisasi belanja barang periode semester I tahun 2022 yaitu kenaikan realisasi pemeliharaan gedung bangunan, pemeliharaan peralatan mesin, belanja persediaan barang konsumsi, anggaran penanganan covid-19, dan kenaikan tarif langganan daya listrik.
3. Belanja Modal mengalami kenaikan realisasi pada semester I Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi semester I Tahun 2021 dikarenakan adanya realisasi anggaran belanja modal yaitu penambahan daya listrik dan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021

Uraian	30 Juni 2022 (Rp)	30 Juni 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	1.901.696.732	2.447.869.778	(28.72)
Belanja Barang	1.029.614.249	804.498.164	21.86
Belanja Modal	109.217.000	0	100.00
Total Belanja	3.040.527.981	3.252.367.942	(6.97)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai: Rp.
1.901.696.732*

1. Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.901.696.732,- dan Rp. 2.447.869.778. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 28,72% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain adanya beberapa pegawai dan hakim yang mendapatkan promosi jabatan yang mengakibatkan adanya pengurangan jumlah hakim dan pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022 (Rp)	30 Juni 2021 (Rp)	Naik(Turun) (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	841.482.660	1.083.128.320	(241.645.660)	(28,72)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.961	16.899	(4.938)	(41,28)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57.925.514	79.929.568	(22.004.054)	(37,97)
Belanja Tunj. Anak PNS	19.119.190	25.310.830	(6.191.640)	(32,38)
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.070.000	13.090.000	980.000	6,96
Belanja Tunj. Fungsional PNS	739.275.000	932.335.000	(193.060.000)	(26,11)
Belanja Tunj. PPh PNS	73.938.386	110.706.594	(36.768.208)	(49,73)
Belanja Tunj. Beras PNS	47.435.100	63.077.820	(15.642.720)	(32,98)
Belanja Uang Makan PNS	102.374.000	131.776.000	(29.402.000)	(28,72)
Belanja Tunjangan Umum PNS	6.065.000	8.990.000	(2.925.000)	(48,23)
Total Belanja Brutto	1.901.696.811	2.448.361.031	(546.664.220)	(28,75)
Pengembalian Belanja	(79)	(491.253)	(491.174)	(621,74)
Total Belanja Netto	1.901.696.732	2.447.869.778	(546.173.046)	(28,72)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.029.614.249*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.029.614.249 dan Rp. 804.498.164. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,86% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain pada tahun 2022 ada kenaikan realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan rumah dinas hakim, kenaikan tarif langganan daya listrik dan tes urin yang dilakukan di awal tahun.

Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	392.940.300	389.407.221	0,90 %
Belanja Barang Non Operasional	5.621.612	1.405.000	75,01 %
Belanja Jasa	87.605.722	86.655.613	1,08 %
Belanja Pemeliharaan	469.376.615	242.170.830	48,41 %
Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000	20.300.000	16,46 %
Belanja Barang Persediaan	49.770.000	64.559.500	(29,72 %)
Total Belanja Brutto	1.029.614.249	804.498.164	21,86 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	1.029.614.249	804.498.164	21,86 %

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal: Rp.
109.217.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Rangkasbitung 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 109.217.000 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 100.00% dibandingkan 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan pada Semester I Tahun Anggaran 2022 sudah dilaksanakan kegiatan realisasi untuk penambahan daya listrik dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 80.750.000,- dan pengadaan peralatan dan mesin seperti lemari arsip dan meja mediasi dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 28.467.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan & Mesin	28.467.000	0	100.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	80.750.000	0	100.00
Total Belanja Brutto	109.217.000	0	100.00
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	109.217.000	0	100.00

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 28.467.000, mengalami kenaikan sebesar 100.00% dibandingkan dengan realisasi 30 Juni TA 2021 sebesar Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni TA 2022

Uraian	Jumlah	Realisasi TA 2022
Meja Mediasi	2 Unit	11.972.000
Rak Arsip	3 Unit	16.495.000
Jumlah Belanja Kotor		28.467.000
Pengembalian		0
Jumlah Belanja		28.467.000

Hal ini disebabkan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2022 adanya pelaksanaan kontrak pengadaan peralatan dan mesin dengan Nomor Kontrak W29.U3/UK-PPK/PL.5.Brg/SP/PN-RKB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 28.467.000,-.

B.2.3.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 80.750.000, mengalami kenaikan sebesar 100.00% dibandingkan dengan realisasi 30 Juni TA 2021 sebesar Rp. 0,-. dikarenakan pada Tahun 2021 tidak tersedia anggaran belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 30 Juni TA 2022

Uraian	Jumlah	Realisasi TA 2022
Penambahan Daya Listrik		80.750.000
Jumlah Belanja Kotor		80.750.000
Pengembalian		0
Jumlah Belanja		80.750.000

Hal ini disebabkan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2022 adanya pelaksanaan kontrak penambahan daya listrik untuk kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor Kontrak W29.U3/UK-PPK/PL.2.Daya.Listrik/SPK/PN-RKB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 80.750.000,-.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.
40.000.000

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Uang Tunai di Brankas	36.650.000	0
Kuitansi UP	3.350.000	0
Jumlah	40.000.000	0

Persediaan: Rp.
4.385.000

C.1.2 Persediaan

Persediaan Per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.385.000 dan Rp. 2.842.250. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

Uraian	30 Juni 2021 (RP)	31 Desember 2020 (RP)
Barang Konsumsi	4.385.000	2.842.250
Total	4.385.000	2.842.250

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Fisik Semester I Tahun 2022 No. W29.U3/2570/UK.02.02/VI/2022 tertanggal 01 Juli 2022.

Piutang Bukan
Pajak
Rp. 965.000

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada periode Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 965.000,- . piutang bukan pajak ini adalah kegiatan pembayaran sewa rumah dinas yang dipotong melalui SPM Gaji Induk Bulan Juli 2022 yang diajukan bulan Juni 2022 dan di SP2D kan pada tanggal 1 Juli 2022.

Tanah :Rp.
17.829.911.000

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.829.911.000 dan Rp. 17.829.911.000. Rincian saldo tanah per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

No.	KIB	Luas (m ²)	Rincian Saldo Tanah				Jumlah
			No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan		
1.	1	396	Hak Milik No.18	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Ketua PN Rangkasbitung	Rp. 614.180.000	
2.	2	296	Hak Pakai No.1	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Wakil Ketua PN Rangkasbitung	Rp.443.183.000	
3.	3	255	Hak Pakai No.6	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Panitera PN Rangkasbitung	Rp.390.392.000	

4.	4	352	Hak Pakai No.23	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Hakim PN Rangkasbitung	Rp.536.807.000
5.	5	600	Hak Pakai No.4	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Hakim PN Rangkasbitung	Rp.915.012.000
6.	1	1.330	Hak Pakai No.2	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Digunakan sendiri bangunan/kant or Pemerintah	Rp. 3.982.353.000
7.	2	3.280	Hak Pakai No.15	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Digunakan sendiri bangunan/kant or Pemerintah	Rp. 10.947.984.000

Jumlah

17.829.911.000

Peralatan dan
Mesin Rp.
2.878.644.546

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo asset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.878.644.546 dan Rp. 2.850.177.546. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	2.850.177.546
Mutasi Tambah	0
Pembelian	28.467.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	2.878.644.546

pada semester I Tahun 2022 terdapat pembelian peralatan mesin berupa 2(dua) unit meja medisi dan 3 (unit) rak arsip dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 28.467.000,-.

*Gedung dan
Bangunan Rp.
9.388.641.000*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.388.641.000,- dan Rp. 9.142.616.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	9.142.616.000
Mutasi Tambah	246.025.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	9.388.641.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	9.142.616.000

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 juni 2022 sebesar Rp. 9.388.641.000,-. Mutasi tambah pengadaan penambahan daya listrik Rp. 80.750.000,- dan hibah penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 165.275.000,- dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 0.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 24.656.000*

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.656.000 dan Rp. 24.656.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	24.656.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	24.656.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	24.656.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 juni 2022 sebesar Rp. 24.656.000. Mutasi tambah sebesar Rp.0 dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0.

Aset Tetap
Lainnya: Rp.
16.957.140,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.957.140 dan Rp. 16.957.140.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	16.957.140
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	16.957.140
Akumulasi Penyusutan s.d 30Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	16.957.140

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 30 juni 2022 sebesar Rp. 16.957.140. Mutasi tambah sebesar Rp.0 dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0.

Akumulasi
Penyusutan:
[Rp.
4.349.682.767]

C.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp. 4.349.682.767) dan (Rp. 4.084.021.910).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Gedung Bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.878.644.546	72.842.223	2.805.802.323
2	Gedung dan Bangunan	9.388.641.000	190.079.079	9.198.561.921
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	24.656.000	2.739.555	21.916.445
4	Aset Tetap Lainnya	16.957.140	0	16.957.140
5	Tanah	17.829.911.000	0	17.829.911000
	Jumlah	30.443.481.961	265.660.857	30.177.821.104

Aset Tetap yang
Belum
Diregister :
Rp. 93.750.000

C.2.7 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 93.750.000 dan Rp. 0. Aset Tetap merupakan barang milik negara (BMN) yang pengadaannya melalui pembelian dan hibah dari pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Nilai aset tetap yang belum diregister adalah transaksi dari penerimaan barang hibah pihak ketiga atau Hibah TAYL yang belum didetailkan pada modul Aset.

Aset Lainnya :
Rp. 0

C.2.8 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset lainnya merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai Aset lain-lain per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp. 304.672.275 dan Rp. 304.672.275. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset Lainnya diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam Aset Lainnya. Aset Lainnya terdiri dari Aset Lain-lain sebesar Rp. 304.672.275 dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar (Rp. 304.672.275) sehingga saldo per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 0.

Utang kepada
Pihak Ketiga :
Rp. 530.928.282

C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 530.928.282,- dan Rp. 14.800.577. utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban bendahara untuk melakukan pembayaran hak kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Utang kepada pihak ketiga pada periode 30 Juni 2022 terdiri dari Beban belanja pegawai yang masih harus dibayar yaitu pengajuan SPM Gaji untuk bulan Juli 2022, SPM Gaji Ketiga belas yang diajukan SPM pada bulan Juni 2022 dan belanja barang yang masih harus dibayar yaitu pengajuan honorarium PPNPN diajukan SPM bulan Juni 2022 tetapi SP2D di bulan Juli 2022.

*Utang yang
belum
ditagihkan :*
Rp. 3.350.000

C.3.2 Utang yang belum ditagihkan

Saldo utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.350.000,- dan Rp. 0. utang yang belum ditagihkan adalah pengeluaran yang berbentuk kuitansi melalui uang persediaan tetapi oleh bendahara belum dilakukan pertanggungjawaban atau belum diajukan SPM ganti uang persediaan.

*Hibah yang
belum Disahkan :*
Rp. 259.025.000

C.3.3 Hibah yang Belum Disahkan

Saldo hibah yang belum disahkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 259.025.000,- dan Rp. 0. hibah yang belum disahkan ini adalah hibah dari pihak ketiga pada tahun anggaran yang lalu (TAYL) tetapi belum diajukan memori pengesahan melalui KPPN Rangkasbitung.

Hibah yang belum disahkan ini berasal dari Bank BTN Cabang Cilegon dengan nomor BAST W29.U3/348/UM.03.04/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 nilai Rp. 259.025.000,-. Rincian barang hibah sebagai berikut :

1. Backdrop PTSP sejumlah Rp. 165.275.000,-
2. Kursi Besi/Metal (10 unit) sejumlah Rp. 2.100.000,-
3. Bangku Panjang Besi/Metal (2 unit) sejumlah Rp. 2.000.000,-
4. Meja Resepsionis (1 unit) sejumlah Rp. 57.750.000,-
5. AC Split (1 unit) sejumlah Rp. 11.000.000,-

*Uang Muka dari
KPPN:*
Rp. 40.000.000

C.3.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4.1. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
25.094.923.637

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.094.923.637 dan Rp. 25.768.337.449. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP: Rp.
12.812.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 12.812.000 dan Rp. 7.067.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021			
Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.812.000	7.067.000	81,29
Total Pendapatan	12.812.000	7.067.000	81,29

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan terdiri dari pendapatan sewa rumah dinas yang dipotong melalui SPM Gaji Induk dan pembayaran sewa kantin.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai:
Rp.
2.403.164.814

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.403.164.814 dan Rp. 2.439.523.669. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni TA 2022

Uraian	30 Juni 2022 (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.075.081.980
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.416
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	73.990.378
Beban Tunj. Anak PNS	24.395.658
Beban Tunj. Struktural PNS	18.090.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	938.125.000
Beban Tunj. PPh PNS	102.139.501
Beban Tunj. Beras PNS	60.687.960
Beban Uang Makan PNS	102.374.000
Beban Tunjangan Umum PNS	8.265.000
Total Beban Pegawai	2.403.164.814

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
31.190.250*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.190.250 dan Rp. 39.983.200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	31.190.250	39.983.200	(21,99)
Total Beban Persediaan	31.190.250	39.983.200	(21,99)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
500.827.257*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 500.827.257 dan Rp. 465.910.209. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan

Jasa untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni TA 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022
Beban Keperluan Perkantoran	393.542.800
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.931.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.470.000
Beban Barang Operasional Lainnya	4.696.500
Beban Barang Non Operasional	3.600.000
Beban Langganan Listrik	60.997.656
Beban Langganan Telepon	628.133
Beban Langganan Air	1.047.500
Beban Sewa	10.892.056
Beban Jasa Lainnya	0
Total Beban barang dan jasa	500.827.257

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 487.063.115*

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 487.063.115,- dan Rp. 266.006.330,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 (Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293.181.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	55.761.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.084.615
Total Beban Pemeliharaan	487.063.115

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
27.000.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.000.000,- dan Rp. 20.300.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh perjalan dinas dalam rangka pelatihan atau sosialisasi serta rapat pimpinan. Rincian Beban Perjalanan untuk 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni TA 2022 (Dalam Rupiah)	
Uraian	30 Juni 2022
Beban Perjalanan Biasa	26.700.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000
Total Beban Perjalanan Dinas	27.000.000

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
265.660.857,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 265.660.857,- dan Rp. 278.373.984,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni TA 2022 (Dalam Rupiah)	
Uraian	30 Juni 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	72.842.223
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.079.079
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.739.555
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	265.660.857

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional : Rp.
(279.000)

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 30 Juni TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni TA 2022 (dalam rupiah)	
Uraian	30 Juni 2022
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(279.000)
Surplus (deficit) Kegiatan Non Operasional	(279.000)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Rp.
25.768.337.449,-

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.768.337.449,- dan Rp. 26.290.183.360,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : (Rp.
3.702.373.293,-)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar (Rp. 3.702.373.293) dan (Rp. 3.502.924.792). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan: Rp.
278.500,-* Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 278.500,- dan Rp. 0. Koreksi nilai persediaan ini muncul karena kesalahan input saldo awal pada aplikasi SAKTI tahun 2022 yang mengakibatkan selisih perbedaan harga dari pembelian persediaan dan sudah dikoreksi kembali.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Koreksi Antar
Entitas: Rp.
3.028.680.981,-* Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.028.680.981,- dan Rp. 3.245.195.342,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.
25.094.923.637,-* Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.094.923.637 dan Rp. 26.032.453.910,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Dari Tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 tidak ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrua tidak dijelaskan pada laporan keuangan Semester 1 Tahun 2022, informasi pendapatan dan belanja secara akrua akan dijelaskan pada laporan keuangan tahunan.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah:

1. BRI Cab. Rangkasbitung virtual account 653240975771000 a.n. BPG: 161 PN RKBT (097577) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi DIPA Ke 01 Tanggal 11 April 2022 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan I

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- ✓ Tidak ada kegiatan Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Semester I Tahun 2022

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

LAPORAN PENDUKUNG

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 KDUAPPAW : 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN
 KODE SATKER : 097577 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data 24/10/22 10:40 AM
 Tgl. Cetak 03/11/2022 8:58 AM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	40,000,000	0	40,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	965,000	0	965,000	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	965,000	0	965,000	0.00
Persediaan	4,385,000	2,842,250	1,542,750	54.28
JUMLAH ASET LANCAR	45,350,000	2,842,250	42,507,750	1,495.57
ASET TETAP				
Tanah	17,829,911,000	17,829,911,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,878,644,546	2,850,177,546	28,467,000	1.00
Cedung dan Bangunan	9,388,641,000	9,142,616,000	246,025,000	2.69
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,656,000	24,656,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	16,957,140	16,957,140	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,349,682,767)	(4,084,021,910)	(265,660,857)	6.50
Aset Tetap yang Belum Diregister	93,750,000	0	93,750,000	0.00
JUMLAH ASET TETAP	25,882,876,919	25,780,295,776	102,581,143	0.40
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	304,672,275	304,672,275	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(304,672,275)	(304,672,275)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25,928,226,919	25,783,138,026	145,088,893	0.56
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	530,928,282	14,800,577	516,127,705	3,487.21
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,350,000	0	3,350,000	0.00
Hiban Yang Belum Disahkan	259,025,000	0	259,025,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	40,000,000	0	40,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	833,303,282	14,800,577	818,502,705	5,530.21
JUMLAH KEWAJIBAN	833,303,282	14,800,577	818,502,705	5,530.21
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,094,923,637	25,768,337,449	(673,413,812)	(2.61)
JUMLAH EKUITAS	25,094,923,637	25,768,337,449	(673,413,812)	(2.61)
JUMLAH EKUITAS	25,094,923,637	25,768,337,449	(673,413,812)	(2.61)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,928,226,919	25,783,138,026	145,088,893	0.56

NERACA PERCOBAAN

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 2900

BANTEN

SATUAN KERJA : 097577

PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data 24/10/22 10:32 AM

Tgl. Cetak 06/11/2022 4:56 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	40,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	965,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,566,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	819,000	0
0.0	131111	Tanah	17,829,911,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,878,644,546	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,388,641,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	24,656,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	16,957,140	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,636,635,649
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,688,391,118
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	24,656,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	93,750,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	304,672,275	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	304,672,275
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	502,228,282
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	28,700,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,350,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	259,025,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	40,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,040,527,981
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,847,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	25,768,337,449
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	278,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,812,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,075,081,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,416	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	79
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	73,990,378	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	24,395,658	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,090,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	938,125,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	102,139,501	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	60,687,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	102,374,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,265,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	393,542,800	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,931,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 2900

BANTEN

SATUAN KERJA : 097577

PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data 24/10/22 10:32 AM

Tgl. Cetak 06/11/2022 4:56 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19,470,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,696,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,600,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,021,612	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	60,997,656	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	628,133	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,047,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,892,056	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,181,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	55,761,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121,084,615	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	26,700,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	72,842,223	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190,079,079	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,739,555	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	31,190,250	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17,036,500	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	279,000	0
JUMLAH			34,309,614,333	34,309,614,333

LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN
 SATUAN KERJA : 097577 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 03/11/22 9:01 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 24/10/22 10:41 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bugian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,812,000	7,067,000	5,745,000	81.293
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,812,000	7,067,000	5,745,000	81.293
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,812,000	7,067,000	5,745,000	81.293
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,403,164,814	2,439,523,669	(36,358,855)	(1.49)
Beban Persediaan	31,190,250	39,983,200	(8,792,950)	(21.992)
Beban Barang dan Jasa	500,827,257	465,910,209	34,917,048	7.494
Beban Pemeliharaan	487,063,115	266,006,330	221,056,785	83.102
Beban Perjalanan Dinas	27,000,000	20,300,000	6,700,000	33.005
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN
 SATUAN KERJA : 097577 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 03/11/22 9:01 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 24/10/22 10:41 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	265.660,857	278.373,984	(12,713,127)	(4.567)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,714,906,293	3,510,097,392	204,808,901	5.835
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,702,094,293)	(3,503,030,392)	(199,063,901)	5.683
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	(279,000)	105,600	(384,600)	(364.205)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	105,600	(105,600)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	279,000	0	279,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(279,000)	105,600	(384,600)	(364.205)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,702,373,293)	(3,502,924,792)	(199,448,501)	5.694
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,702,373,293)	(3,502,924,792)	(199,448,501)	5.694

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN
 JENIS SATUAN KERJA : KD
 SATUAN KERJA : 097577 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data : 24/10/22 10:41 AM
 Kode Lap : LPE.SATKER
 Tanggal : 03/11/22 9:06 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	25,768,337,449	26,290,183,360	(521,845,911)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,702,373,293)	(3,502,924,792)	(199,448,501)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	278,500	0	278,500	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	278,500	0	278,500	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,028,680,981	3,245,195,342	(216,514,361)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(673,413,812)	(257,729,450)	(415,684,362)	-
EKUITAS AKHIR	25,094,923,637	26,032,453,910	(937,530,273)	-

LAPORAN REALISASI BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 097577
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BA(005) ES(01) BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Kode Lap : LRA B S 2
Tanggal : 05/11/22 3:54 PM
Halaman : 1
Pg ID : lap_lra_bei_akun-SAKTI
Tgl Data : 24/10/22 10:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.425.072,000	2.425.072,000	841.482,660	0	841.482,660	34,7	1.583.589,340
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	25,000	25,000	11,961	0	11,961	47,84	13,118
511119	Belanja Pembuktian Gaji PNS	185,967,000	185,967,000	57,925,514	0	57,925,514	31,15	128.041,486
511121	Belanja Tunj. Suamistrir PNS	46,109,000	46,109,000	19,119,190	0	19,119,190	41,47	26.989,810
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	21,280,000	21,280,000	14,070,000	0	14,070,000	66,12	7.210,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.845.830,000	1.845.830,000	739,275,000	0	739,275,000	40,05	1.106.555,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	216,895,000	216,895,000	73,938,386	0	73,938,386	34,09	142.956,614
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	121,393,000	121,393,000	47,435,100	0	47,435,100	39,08	73.957,900
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	360,000,000	360,000,000	102,374,000	0	102,374,000	28,44	257.626,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	12,810,000	12,810,000	6,065,000	0	6,065,000	47,35	6.745,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.235,381,000	5.235,381,000	1.901,696,811	79	1.901,696,732	36,32	3.333,684,268
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5.235,381,000	5.235,381,000	1.901,696,811	79	1.901,696,732	36,32	3.333,684,268
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5.235,381,000	5.235,381,000	1.901,696,811	79	1.901,696,732	36,32	3.333,684,268
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	584.631,000	579.431,000	364.842,800	0	364.842,800	62,97	214.588,200
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,800,000	10,800,000	3,931,000	0	3,931,000	36,4	6.869,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,328,000	50,328,000	19,470,000	0	19,470,000	38,69	30.858,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	42,065,000	29,829,000	4,696,500	0	4,696,500	15,74	25.132,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	687.824,000	670,388,000	392,940,300	0	392,940,300	58,61	277,447,700
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	5,000,000	5,000,000	2,021,612	0	2,021,612	40,43	2.978,388
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,600,000	8,600,000	5,621,612	0	5,621,612	65,37	2.978,388
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,400,000	80,400,000	49,770,000	0	49,770,000	61,9	30.630,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	80,400,000	80,400,000	49,770,000	0	49,770,000	61,9	30.630,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	150,480,000	150,480,000	74,731,329	0	74,731,329	49,66	75.748,671
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	724,837	0	724,837	6,04	11.275,163
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	1,257,500	0	1,257,500	52,4	1.142,500
522141	Belanja Sewa	79,100,000	79,100,000	10,892,056	0	10,892,056	13,77	68.207,944
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2.000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 097577
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BA(005) ES1(01) BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Kode Lap : LRA B.S.2
Tanggal : 05/11/22 3:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_tra_bel_akun--SAKTI
Tgl Data : 24/10/22 10:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
		5	6	7=5-6	8=5/4	9=1-7			
522192	Belanja jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	250.980.000	250.980.000	87.605.722	0	87.605.722	34,91	163.374.278	
5231	Belanja Pemeliharaan	292.905.000	305.541.000	293.181.000	0	293.181.000	95,95	12.360.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.000.000	56.000.000	55.761.000	0	55.761.000	99,57	239.000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	184.594.000	189.384.000	120.434.615	0	120.434.615	63,59	68.959.385	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	533.499.000	550.935.000	469.376.615	0	469.376.615	85,2	81.558.385	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	57.600.000	57.600.000	24.000.000	0	24.000.000	41,67	33.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.800.000	1.800.000	300.000	0	300.000	16,67	1.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.400.000	59.400.000	24.300.000	0	24.300.000	40,91	35.100.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1.620.703.000	1.620.703.000	1.029.614.249	0	1.029.614.249	63,53	591.088.751	
53	BELANJA MODAL	160.000.000	160.000.000	28.467.000	0	28.467.000	17,79	131.533.000	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000	160.000.000	28.467.000	0	28.467.000	17,79	131.533.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000	160.000.000	28.467.000	0	28.467.000	17,79	131.533.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	160.000.000	160.000.000	28.467.000	0	28.467.000	17,79	131.533.000	
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.000.000	81.000.000	80.750.000	0	80.750.000	99,69	250.000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	81.000.000	81.000.000	80.750.000	0	80.750.000	99,69	250.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	241.000.000	241.000.000	109.217.000	0	109.217.000	45,32	131.783.000	
	JUMLAH BELANJA	7.097.084.000	7.097.084.000	3.040.528.060	79	3.040.527.981	42,84	4.056.556.019	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG 097577

Waktu Eksp : 2022-10-24 10:35:26.01666616416
 Kode Laporan : LRA.F.S
 Tanggal : 03/11/22 9:08 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_sakher_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1-	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	7.097.084.000	3.040.527.981	(4.056.556.019)	43	6.631.724.000	3.252.367.942	3.379.356.058	49
C	PEMBAYARAN				0				0

***BERITA ACARA STOCK
OPNAME FISIK***

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jl. R. L. Farid No. 75 Telp./Fax (0252) 201057 Rangkasbitung 42314
email: info@pn-rangkasbitung.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK SEMESTER I TAHUN 2022 BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577) NOMOR : W29.U3/ 2590 /UK.02.02/VI/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : DARSONO, S.H
NIP : 196607091989031002
Jabatan : Sekretaris (Kuasa Pengguna Barang)
- II. Nama : AGUS MULYADI, S.Sos
NIP : 197908272006041004
Jabatan : Kasubbag. Umum & Keuangan (Pengelola Barang Persediaan)

Menyatakan bahwa telah melakukan *stock opname* barang persediaan periode Semester I Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JML BRG
1	2	3
1010301001-000001	Pulpen Gel Joyko Boxes	2 Boxes
1010301001-000003	Pulpen Standar AE7 Fine	6 Boxes
1010301002-000002	Bak Stempel	4 pcs
1010301003-000001	Binder Clips No. 260	3 boxes
1010301004-000001	Penghapus/Korektor Tipe-Ex	3 pcs
1010301010-000001	Alat Perekat Lakban Hitam Besar	3 pcs
1010301010-000003	Isolatip Putih Besar	1 pcs
1010301010-000011	Alat Perekat Cair Botol Boxes	1 boxes
1010301010-000013	Isolatip Putih Sedang	9 pcs
1010301012-000001	Staples Kecil	20 pcs
1010301012-000002	Staples Besar	5 pcs
1010302001-000001	Kertas HVS A4 80 Gsm	12 rim
1010302001-000002	Kertas HVS F4 80 Gsm	1 rim
1010302001-000003	Kertas HVS Warna	2 rim
1010302002-000001	Kertas Karbon Folio	4 pak
1010302002-000007	Post It Mark & Note	3 pcs
1010303002-000011	Tinta Cetak Botol E-print Hitam	1 pcs
1010304002-000002	Tempat / Amplop Cd Set	4 set
1010304004-000011	Tinta/Toner Data Print Dp-41	5 set
1010304010-000001	Mouse Kabel	4 pcs
1010304011-000001	CD - R	2 set
1010304011-000003	DVD - R	1 set
1010305008-000001	Pembersih Kaca Cling Botol	6 pcs
1010305008-000012	Pembersih Toilet Wipol 750 ml	5 pcs
1010305008-000021	Pembersih Porselen Prostex 1000 ml	3 pcs
1010305008-000022	Soklin Lantai Botol 900 ml	10 pcs
1010305012-000001	Pengharum Stella Semprot 400 ml	5 pcs
1010305012-000005	Pengharum Stella Gantung	8 pcs


PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jalan Dr. L. Kartini No. 55 Telp./Fax (0252) 201057 Rangkasbitung 42314

email: info@pn-rangkasbitung.go.id

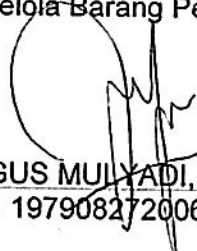
Demikian Berita Acara stock opname ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Barang



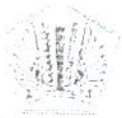
DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

Pengelola Barang Persediaan



AGUS MULYADI, S.Sos
NIP. 197908272006041004

HASIL REKONSILIASI



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 097577
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,097,084,000	7,097,084,000	0
2	Belanja	3,040,528,060	3,040,528,060	0
3	Pengembalian Belanja	-79	-79	0
4	Estimasi Pendapatan	12,404,000	12,404,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11,847,000	11,847,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	40,000,000	40,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	40,000,000	40,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JUL-22

